



BERSAMA KABUPATEN/KOTA

Pemda DIY Koordinasi Penyaluran BLT BBM

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, akan segera melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam hal penyaluran bantuan sosial dampak kenaikan BBM. Koordinasi itu sekaligus untuk mengetahui besaran alokasi 2 persen yang merupakan upaya refocusing dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diamanatkan Pemerintah Pusat.

"Mulai September pemberian BLT akan dimulai, tentu kami akan segera melakukan koordinasi. Adapun soal dukungan Pemda 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU), kita memerlukan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk dipresentasikan uang yang bisa dialokasikan berapa," kata Gubernur DIY, Sri Sultan HB X se usai mengikuti Rapat Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial Dampak Kenaikan BBM secara dar-

ing dari Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Senin (5/9).

Sultan mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait pencairan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM). Termasuk melibatkan pemerintah kabupaten dan kota di Yogyakarta. Karena seperti diketahui bersama Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial memberikan BLT BBM. Be-

sarannya adalah Rp 600.000 adapun pencairannya dibagi mulai September.

"Dalam waktu dekat kami akan ada pembahasan soal itu. Tentunya dengan melibatkan instansi terkait dan pemerintah kabupaten/kota. Semua itu untuk memastikan akurasi data penerima BLT BBM," ujarnya.

Dalam rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara



KR-Riyana Ekawati

Sri Sultan HB X

memaparkan, bantuan sosial yang telah dan segera direalisasikan pemerintah pusat. Menurut Suahasil, pemberian bantuan sosial tambahan ini bersumber dari dana pengalihan subsidi dan kompensasi yang diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan berkeadilan. "Pemberian bansos tam-

bahan sebesar Rp 24,17 triliun ini diharapkan memberi manfaat lebih besar dan efektif mengurangi angka kemiskinan. Bansos yang siap dieksekusi ialah BLT bagi 20 juta lebih penerima manfaat dan BSU bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta perbulan," ungkapnya.

Adapun untuk program perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja, serta subsidi transportasi yang dianggarkan 2 persen dari DTU masing-masing Pemda provinsi maupun kabupaten/kota, Suahasil berharap dapat dieksekusi mulai Oktober 2022. Menurut perhitungan alokasi bansos tambahan ini sudah disesuaikan dengan postur APBN tahun 2022. **(Ria)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005